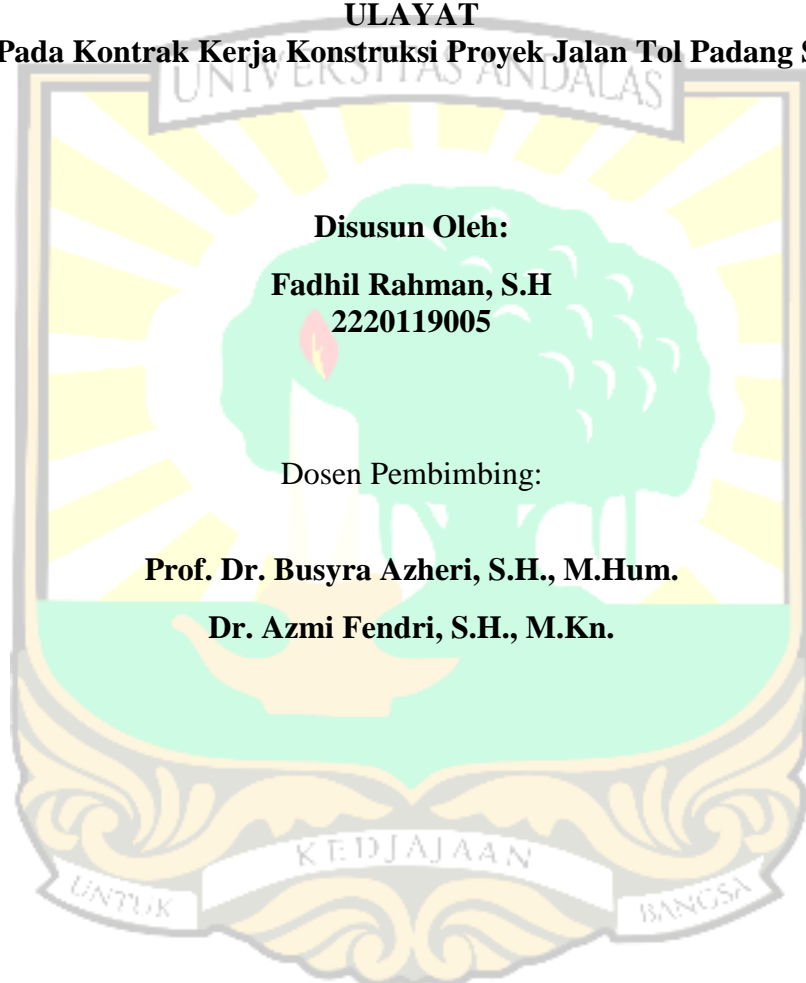




**KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI AKTA
KONSOLIDASI DAN GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN TANAH
ULAYAT**

(Studi Pada Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Jalan Tol Padang Sicincin)



Disusun Oleh:

**Fadhil Rahman, S.H
2220119005**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KONSOLIDASI DAN GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN TANAH ULAYAT

(Studi Pada Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Jalan Tol Padang Sicincin)

**(Fadhil Rahman, 2220119005, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2024)**

ABSTRAK

Proyek pembangunan jalan tol padang-sicincin merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas wilayah di pulau sumatera. Namun proyek ini menghadapi banyak kendala hukum dan sosial dalam pelaksanaannya terutama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah adat yang dimiliki oleh komunitas tertentu, sering kali menjadi sumber konflik karena perbedaan pemahaman mengenai hak milik dan kompensasi yang pantas sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam proses perolehannya. Selain itu, proses pembebasan lahan tanah ulayat yang cenderung tidak berjalan sesuai target waktu dapat menghambat pelaksanaan proyek serta merugikan masyarakat adat yang terdampak. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis data primer yang diperoleh dari wawancara, data keadaan lapangan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Poin penting dari penelitian ini adalah Bagaimana Keberadaan Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Nasional Pada Tanah Ulayat, serta Bagaimana Akibat Hukum Kontrak Kerja Konstruksi yang tidak Memiliki Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Pembebasan Lahan pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebagai Bentuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?. Setelah melakukan penelitian dengan metode kualitatif berupa wawancara kepada pihak yang berkompeten di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta pemangku kebijakan terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan program strategis nasional pembangunan infrastruktur ini, peneliti menyimpulkan bahwa perlunya perbaikan sistem aturan dan tahapan pengadaan tanah yang berhubungan dengan kawasan masyarakat hukum adat atau tanah ulayat dan kemudian maturisasi perencanaan program pembangunan nasional yang memiliki potensi besar terjadinya konflik hukum dan sosial dalam penyelenggaraannya. Selain itu dari hasil penelitian juga menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penerapan terkait pengadaan tanah yang harus diselesaikan sebelum dibuatnya kontrak kerja konstruksi. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi penting untuk perkembangan hukum kontrak konstruksi dan perlindungan hak-hak tanah adat di Indonesia

Kata Kunci: Pembangunan Jalan Tol, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Tanah Ulayat

CONSTRUCTION WORK CONTRACTS THAT DO NOT HAVE A DEED OF CONSOLIDATION AND COMPENSATION FOR CUSTOMARY LAND ACQUISITION

(Study on the Padang Sicincin Toll Road Project Construction Work Contract)

(Fadhil Rahman, 2220119005, Master of Law Studies Program, Faculty of Law, Andalas University, 2024)

ABSTRACT

The Padang-sicincin toll road construction project is part of the Indonesian government's efforts to accelerate infrastructure development and improve regional connectivity on the island of Sumatra. However, this project faces many legal and social obstacles in its implementation, especially in land acquisition for the public interest on customary land. Customary land is customary land owned by certain communities, often a source of conflict due to differences in understanding of property rights and appropriate compensation so that it requires a special approach in the acquisition process. In addition, the process of land acquisition of customary land, which tends not to run according to the target time, can hamper project implementation and harm the affected indigenous people. This study uses an empirical juridical approach with primary data analysis obtained from interviews, field situation data, and relevant laws and regulations. The important points of this research are How is the Existence of a Deed of Consolidation and Indemnity in the Construction Work Contract for National Infrastructure Development on Customary Land, and What are the Legal Consequences of Construction Work Contracts that do not have a Deed of Consolidation and Indemnity for Land Acquisition in National Infrastructure Development Work as a Form of Development for the Public Interest. After conducting research and interviews with competent parties at the Ministry of Public Works and Public Housing and the parties involved in the implementation of this national strategic program of infrastructure development, the researcher concluded that there is a need to improve the system of rules and stages of land acquisition related to customary law community areas or customary land and then maturation of national development program planning which has great potential for legal and social conflicts in its implementation. In addition, the results of the study also show the need for improved regulations and applications related to land acquisition that must be completed before a construction work contract is made. Thus, this research can make an important contribution to the development of construction law and the protection of customary land rights in Indonesia.

Kata Kunci: Toll Road Construction, Land Acquisition for Public Interest, Customary Land